

**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

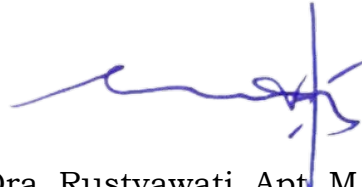
Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I TA 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 14 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a vertical line, positioned above the name of the signatory.

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	61

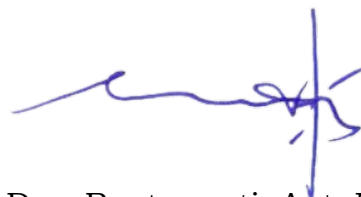
**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23, JAKARTA PUSAT 10560
TELEPON 021 4244819, 4207683, 4244691 FAXIMILE 021 4244819**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I TA 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I TA 2024 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 14 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I TA 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp63.150.550.000,00 atau mencapai 52 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp120.626.800.000,00. Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp23.210.653.395,00 atau mencapai 43 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp53.601.083.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.661.490.398,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp536.782.000,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp4.700.129.879,00, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp424.578.519,00, Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.530.228.036,00 dan Rp3.131.262.362,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. beban surplus/defisit dari operasi. surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp71.737.425.000,00.

Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp25.349.739.887,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp46.387.685.113,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp46.387.685.113,00. sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp46.387.685.113,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar (Rp3.316.526.146,00) dikurangi Surplus-LO sebesar Rp46.387.685.113,00 ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp39.939.896.605,00) serta kenaikan ekuitas sebesar Rp6.447.788.508,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.131.262.362,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2024 DAN 2023**

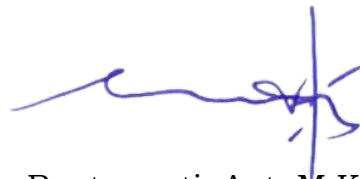
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2024			% thd Angg	30 Juni 2023
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	120.626.800.000,00	63.150.550.000,00	(57.476.250.000,00)	52,35	57.169.598.910,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		120.626.800.000,00	63.150.550.000,00	(57.476.250.000,00)	52,35	57.169.598.910,00
BELANJA	B.2.					
Belanja Barang	B.3	51.659.083.000,00	21.948.259.395,00	(29.710.823.605,00)	42,49	24.034.964.009,00
Belanja Modal	B.4	1.942.000.000,00	1.262.394.000,00	(679.606.000,00)	65,00	1.239.665.900,00
JUMLAH BELANJA		53.601.083.000,00	23.210.653.395,00	(30.390.429.605,00)	43,30	25.274.629.909,00

Jakarta, 14 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	500.000.000,00	-
Persediaan	C.1.2	36.782.000,00	28.116.000,00
Jumlah Aset Lancar		536.782.000,00	28.116.000,00
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	16.178.376.778,00	16.017.692.725,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.3	302.765.200,00	302.765.200,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(11.781.012.099,00)	(11.686.355.425,00)
Jumlah Aset Tetap		4.700.129.879,00	4.634.102.500,00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	1.696.504.400,00	2.117.140.400,00
Aset Lain-Lain	C.3.2	1.101.709.947,00	
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(2.373.635.828,00)	(1.509.010.046,00)
Jumlah Aset Lainnya		424.578.519,00	608.130.354,00
JUMLAH ASET		5.661.490.398,00	5.270.348.854,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	1.945.811.910,00	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2	84.416.126,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.3	-	8.586.875.000,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	500.000.000,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.530.228.036,00	8.586.875.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.530.228.036,00	8.586.875.000,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	3.131.262.362,00	(3.316.526.146,00)
JUMLAH EKUITAS		3.131.262.362,00	(3.316.526.146,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.661.490.398,00	5.270.348.854,00

Jakarta, 14 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2024 DAN 2023**

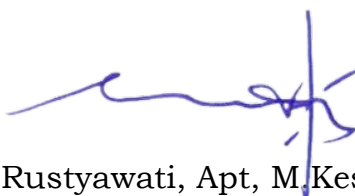
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	71.737.425.000,00	66.373.012.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		71.737.425.000,00	66.373.012.500,00
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	109.619.000,00	118.779.800,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	9.032.117.636,00	9.674.810.752,00
Beban Pemeliharaan	D.4	59.093.400,00	25.366.249,00
Beban Perjalanan Dinas	D.5	14.768.991.395,00	15.504.065.791,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	1.379.918.456,00	1.202.520.894,00
JUMLAH BEBAN		25.349.739.887,00	26.525.543.486,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		46.387.685.113,00	39.847.469.014,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	45.678.910,00
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		-	228.087.720,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.7	-	(182.408.810,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional			5.270.000,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan non Operasional Lainnya	D.8	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	(177.138.810,00)
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		46.387.685.113,00	39.670.330.204,00

Jakarta, 14 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023
EKUITAS AWAL	E.1	(3.316.526.146,00)	(3.508.378.978,00)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	46.387.685.113,00	39.670.330.204,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	(5.353.636,00)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	(5.353.636,00)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(39.939.896.605,00)	(31.894.969.001,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	6.447.788.508,00	7.770.007.567,00
EKUITAS AKHIR		3.131.262.362,00	4.261.628.589,00

Jakarta, 14 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

*Profil dan
Kebijakan Teknis
Satker Deputy II*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 30 Juni 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 30 Juni 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

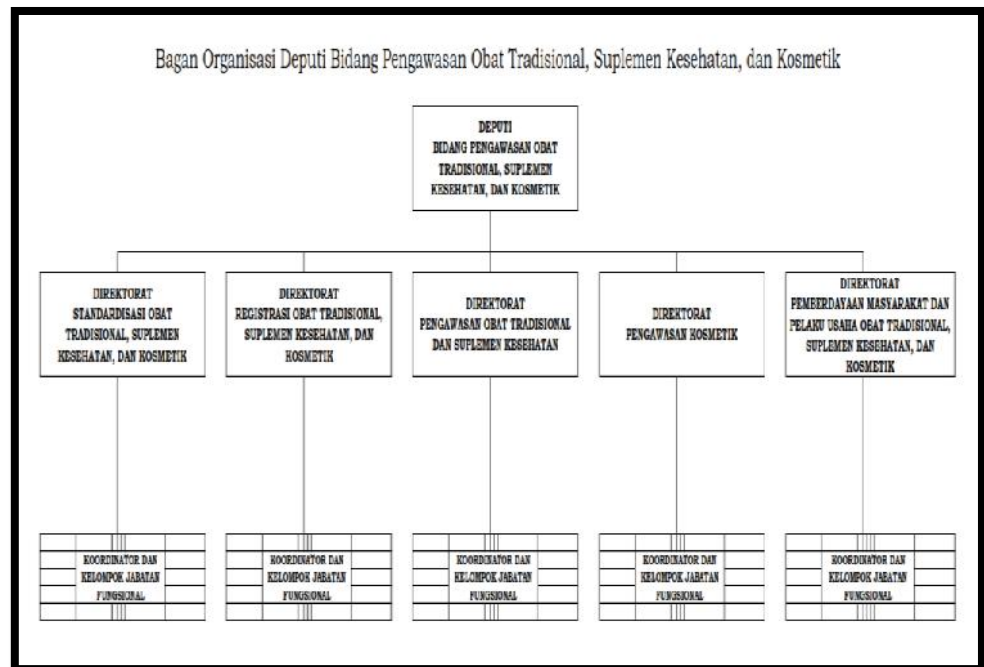
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Deputy II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

- Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Direktorat Pengawasan Kosmetik
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

A.1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi diisi nama satker untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019-2024. Indonesia maju

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk periode TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh

aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengajui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam penyusunan dan penyajian Laporan

Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan BPOM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

- Pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE)
 - Penerbitan Nomor Izin Edar dan Notifikasi, Persetujuan Iklan, dan Penerbitan persetujuan uji klinik
 - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang baik
 - Penerbitan Persetujuan Denah Kosmetik
 - Penerbitan rekomendasi Fasilitas Bersama
 - Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul

hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria kualitas piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan asset yang berupa :

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Perbandingan, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku perbandingan.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku perbandingan yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Perka BPOM No. 3 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan BPOM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sampel*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke

masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
 2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
 - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
 3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.
- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:

- a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorim yang belum digunakan.
 - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik.
- b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknik SAP Nomor 9; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN; serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam SAP adalah sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor :240/KM.6/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah

Pusat. Di BPOM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp53.601.083.000,00. Selama periode Semester I TA 2024 telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 5 kali dari DIPA awal. Hasil revisi ini menyebabkan kenaikan anggaran menjadi Rp53.601.083.000,00. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai. Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Revisi DIPA 1 tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.02.24.341 tanggal 15 Februari 2024
- Revisi DIPA 2 tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.03.24.631 tanggal 27 Maret 2024
- Revisi DIPA 3 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.05.24.941 tanggal 27 Mei 2024
- Revisi DIPA 4 tanggal 5 Juni 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat

usulan revisi anggaran Nomor B-PR.05.03.43.07.24.801 tanggal 2 Juli 2024

- Revisi DIPA 5 tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran Nomor B-PR.05.03.43.07.24.794 tanggal 7 Juli 2024

*Tabel 10.
Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)*

Uraian	30 Juni 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	120.626.800.000,00	120.626.800.000,00
Jumlah Pendapatan	120.626.800.000,00	120.626.800.000,00
Belanja		
Belanja barang	51.659.083.000,00	51.659.083.000,00
Belanja Modal	1.942.000.000,00	1.942.000.000,00
Jumlah Belanja	53.601.083.000,00	53.601.083.000,00

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Anggaran dan Program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

*Realisasi
Pendapatan
Rp63.150.550.000,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp63.150.550.000,00 atau mencapai 52.35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp120.626.800.000,00. Pendapatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berasal dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 12.
Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30-Jun-24		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara dan Hibah	-	-	-
1. Penerimaan Dalam Negeri	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	120.626.800.000,00	63.150.550.000,00	52,35
Jumlah	120.626.800.000,00	63.150.550.000,00	52,35

Realisasi Pendapatan TA 2024 berupa pendapatan fungsional yang berasal dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan, dengan perincian sebagai berikut

Tabel 13. Perincian Pendapatan

(dalam Rupiah)

No	Akun	Uraian	Estimasi	Realisasi	Persentase
1,00	425.321,00	Pendapatan jasa Pengawasan Obat dan Makanan	120.626.800.000,00	63.150.550.000,00	52,35
Total PNBPN				63.150.550.000,00	

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 mengalami kenaikan 10.46 persen dibandingkan 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan PNBPN Fungsional dicatat oleh Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berasal dari Pendapatan Fungsional sebesar 52.35 persen dari estimasi pendapatan. Perincian Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 15.
Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	63.150.550.000,00	57.169.598.910,00	10,46
Jumlah	63.150.550.000,00	57.169.598.910,00	10,46

Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp63.150.550.000,00 merupakan Pendapatan Fungsional Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 16.

*Perincian Realisasi Pendapatan Per Jenis Layanan
30 Juni 2024*

Nama Unit	Realisasi	Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi	Jasa Sertifikasi
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan	52.688.850.000,00	52.688.950.000,00	-
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	634.800.000,00	-	634.800.000,00
Direktorat Pengawasan Kosmetik	9.826.900.000,00	-	9.826.900.000,00
Total	63.150.550.000,00		

*Realisasi Belanja
Rp23.210.653.395,00*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp23.210.653.395,00 atau 43 persen dari anggaran belanja sebesar Rp53.601.083.000,00. Perincian Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15.

*Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	30-Jun-24		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	51.659.083.000,00	22.076.001.267,00	42,73
Belanja Modal	1.942.000.000,00	1.262.394.000,00	65,00
Total Belanja Kotor	53.601.083.000,00	23.338.395.267,00	43,54
Pengembalian		(127.741.872,00)	-
Jumlah	53.601.083.000,00	23.210.653.395,00	43,30

Dibandingkan 30 Juni 2023 realisasi Belanja yang berakhir pada 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 8.17 persen dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2023. Hal ini

disebabkan karena adanya penurunan pada belanja barang berupa belnja perjalanan dinas sebesar 8.42 persen.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	22.076.001.267,00	24.105.111.939,00	(8,42)
Belanja Modal	1.262.394.000,00	1.239.665.900,00	1,83
Jumlah	23.338.395.267,00	25.344.777.839,00	(7,92)
Pengembalian	(127.741.872,00)	(70.147.930,00)	82,10
Jumlah Netto	23.210.653.395,00	25.274.629.909,00	(8,17)

Belanja Barang
Rp21.948.259.395,00

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir pada periode 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp21.948.259.395,00 dan Rp24.034.964.009,00. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 8.68 persen dari Realisasi Belanja Barang pada TA 30 Juni 2023 karena menurunnya belanja operasional sebesar 51.17 persen. Perincian Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 18.
Perbandingan Belanja Barang
Untuk periode yang Berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	425.616.852,00	871.650.163,00	(51,17)
Belanja Barang Non Operasional	3.592.563.880,00	4.414.689.934,00	(18,62)
Belanja Barang Konsumsi	107.836.000,00	96.653.700,00	11,57
Belanja Jasa	4.092.066.477,00	3.941.033.505,00	3,83
Belanja Pemeliharaan	57.093.400,00	25.366.249,00	125,08
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	13.647.749.128,00	14.755.718.388,00	(7,51)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	153.075.530,00	0,00	-
Jumlah Belanja Kotor	22.076.001.267,00	24.105.111.939,00	(8,42)
Pengembalian Belanja	(127.741.872,00)	(70.147.930,00)	-
Jumlah Belanja	21.948.259.395,00	24.034.964.009,00	(8,68)

Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp127.741.872,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Pengembalian belanja bahan sebesar Rp2.530.000,00
- Pengembalian belanja Jasa Profesi sebesar Rp1.155.000,00
- Pengembalian belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp23.230.967,00
- Pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp380.000,00
- Pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp71.876.905,00, dan
- Pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp28.569.000,00

Belanja Modal
Rp1.262.394.000,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal yang berakhir pada periode 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.262.394.000,00 dan Rp1.239.665.900,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.83 persen dibandingkan 30 Juni 2023 dikarenakan adanya peningkatan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan APD pegawai baru. Perincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.262.394.000,00	1.114.315.900,00	13,29
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	6.400.000,00	100,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	69.000.000,00	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0,00	49.950.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	1.262.394.000,00	1.239.665.900,00	1,83
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.262.394.000,00	1.239.665.900,00	1,83

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.262.394.000,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berakhir pada periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.262.394.000,00 dan Rp1.114.315.900,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 13,29 persen bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2023 disebabkan karena penambahan peralatan dan mesin berupa APD untuk pegawai baru. Perincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 21.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir pada
Per 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Alat Angkutan	0,00	0,00	0%
Alat Kantor dan Rumah tangga	183.796.000,00	183.502.900,00	0,2
Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	0,00	103.364.000,00	-100,0
Alat Laboratorium	0,00	23.750.000,00	-100,0
Komputer Unit dan Peralatan Komputer	1.078.598.000,00	803.699.000,00	34,20
Jumlah Belanja Kotor	1.262.394.000,00	1.114.315.900,00	13,29
Pengembalian	0,00	0,00	N/A
Jumlah Belanja	1.262.394.000,00	1.114.315.900,00	13,29

Perincian belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa :

Tabel 23. Perincian belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Uraian	Kuantitas	Nilai
Rak Besi	3	5.700.000,00
Laci Box	4	9.660.000,00
Meja Kerja Kayu	6	137.412.000,00
Kursi Besi/Metal	12	22.204.000,00
Dispenser	1	2.320.000,00
Tempat Sampah	1	6.500.000,00
PC Unit	5	105.000.000,00
Laptop	56	961.598.000,00
Tablet PC	2	12.000.000,00
Grand Total	90	1.262.394.000,00

Belanja Modal
Lainnya

Rp0,00

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir pada periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp69.000.000,00. Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2023 dikarenakan tidak ada pengadaan Aset Tak Berwujud. Belanja Modal Lainnya berupa:

Tabel 24.

Perincian Belanja Modal Lainnya
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Software	0,00	69.000.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0,00	69.000.000,00	(100,00)
Pengembalian	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	0,00	69.000.000,00	(100,00)

Belanja
Penambahan Nilai
Aset Tetap
Lainnya dan/ atau
Aset Lainnya
Rp0,00

B.5.4 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang berakhir pada periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp49.950.000,00. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap

Lainnya dan/atau Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp149.594.400,00 bila dibandingkan dengan realisasi 30 Juni 2023.

*Tabel 25.
Perincian Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap
Lainnya dan/atau Aset Lainnya
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	Naik (Turun) %
1	Software	0	433.119.400,00	(100,00)
2	Jumlah Belanja Kotor	0	433.119.400,00	(100,00)
3	Pengembalian	0	0,00	-
Jumlah Belanja		0	433.119.400,00	(100,00)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp536.782.000,00

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp536.782.000,00 dan Rp28.116.000,00 Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran*
Rp500.000.000,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing adalah sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	30-Jun-24	30-Jun-23
Kas di Rekening Mandiri No. Rekening : 8100124451611000 BPG175.Deputi II Badan POM RI	210.878.316,00	0
Kuitansi yang belum di SPM GU dan TUP	288.537.200,00	0
Uang Muka Kegiatan (kas pada BPP)	584.484,00	0
Jumlah	500.000.000,00	0

Persediaan
Rp36.782.000,00

C.1.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp36.782.000,00 dan Rp28.116.000,00 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Persediaan
per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	30-Jun-24	31-Dec-23
Barang Konsumsi	36.782.000,00	28.116.000,00
Jumlah	36.782.000,00	28.116.000,00

Tidak terdapat barang usang rusak per 30 Juni 2024. Telah dilakukan Stock Opname sesuai Berita Acara Stock Opname Nomor PL.03.10.42.07.24.07 tanggal 30 Juni 2024.

Aset Tetap
Rp4.700.129.879,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.700.129.879,00 dan Rp4.634.102.500,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

*Peralatan dan
Mesin*

Rp16.178.376.778,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp16.178.376.778,00 dan Rp16.017.692.725,00. Perincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin
(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	16.017.692.725,00
Mutasi tambah:	1.262.394.000,00
Pembelian	1.262.394.000,00
Mutasi kurang:	1.101.709.947,00
Penghentian Aset dari Penggunaan BMN	1.101.709.947,00
Saldo per 30 Juni 2024	16.178.376.778,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(11.781.012.099)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	4.397.364.679,00

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp1.262.394.000,00 merupakan transaksi pembelian dengan perincian sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp1.262.394.000,00 terdiri dari :

Tabel 28. Pembelian Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Lap Top	56	961.598.000,00
Dispenser	1	2.320.000,00
Meja Kerja Kayu	6	137.412.000,00
Tablet PC	2	12.000.000,00
P.C Unit	5	105.000.000,00
Rak Besi	3	5.700.000,00
Laci Box	4	9.660.000,00
Kursi Besi/Metal	12	22.204.000,00
Tempat Sampah	1	6.500.000,00
Jumlah	90	1.262.394.000,00

Mutasi kurang peralatan dan mesin sebesar Rp1.101.709.947,00 merupakan transaksi penghentian aset dari penggunaan BMN sesuai dengan Surat Keterangan No. B-PL.03.09.44.06.24.1052 tanggal 25 Juni 2024.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp302.765.200,00*

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp302.765.200,00 dan Rp302.765.200,00. Aset tetap tersebut monografi, buku lainnya, dan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya. Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya periode pelaporan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	302.765.200,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Penghentian Aset dari penggunaan	0,00
Saldo per 30 Juni 2024	302.765.200,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0,00
Nilai Buku per 30 Juni 2024	302.765.200,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset tetap lainnya

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp11.781.012.099,00)*

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp11.781.012.099,00) dan (Rp11.686.355.425,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. *Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2024*

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16.178.376.778,00	11.781.012.099,00	4.397.364.679,00
2	Aset Tetap Lainnya	302.765.200,00	-	302.765.200,00
Akumulasi Penyusutan		16.481.141.978,00	11.781.012.099,00	4.700.129.879,00

*Aset Lainnya
Rp424.578.519,00*

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp424.578.519,00 dan Rp608.130.354,00. Aset Lainnya merupakan aset yang

tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

*Aset Tak Berwujud
Rp1.696.504.400,00*

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp1.696.504.400,00 dan Rp2.117.140.400,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.117.140.400,00
Mutasi tambah:	420.636.000,00
Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset lainnya	420.636.000,00
Mutasi kurang:	841.272.000,00
Penghentian Aset dari Penggunaan BMN	420.636.000,00
Pencatatan barang yang mau dihapuskan	420.636.000,00
Saldo per 30 Juni 2024	1.696.504.400,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(1.277.624.881,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	418.879.519,00

Terdapat Mutasi tambah aset tak berwujud sebesar Rp420.636.000,00 merupakan transaksi reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dengan penjelasan sebagai berikut. Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset lainnya sebesar Rp420.636.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai	No Surat
1	Aplikasi tindak lanjut pengawasan OT dan SM NUP. 80 tahun perolehan 2016	1	420.636.000,00	PL.03.09.43.01.24.191 25 Januari 2024
Jumlah Belanja		1	420.636.000,00	

Terdapat Mutasi Kurang sebesar Rp841.272.000,00 terdiri dari:

1. Penghentian aset dari penggunaan sebesar senilai Rp420.636.000,00 sesuai Surat Keterangan Penghentian BMN Nomor PL.03.09.43.01.24.191 tanggal 25 Januari 2024
2. Pencatatan barang yang mau dihapuskan sebesar Rp420.636.000,00 sesuai Surat Kepala KPKNL Jakarta VI Nomor S-103/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 13 Juni 2024

Aset Lain-lain
Rp1.101.709.947,00

C.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp1.101.709.947,00 dan Rp0,00. Berupa barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan Kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Adapun mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Aset Lain-lain

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	1.101.709.947,00
Penghentian dari penggunaan	1.101.709.947,00
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	1.101.709.947,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(1.100.190.947,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1.519.000,00

Penghentian dari penggunaan peralatan dan mesin sebesar senilai Rp1.101.709.947,00 sesuai Surat Keterangan Nomor B-PL.03.09.44.06.24.1052 tanggal 25 Juni 2024

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(Rp2.373.635.828,00)*

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp2.373.635.828,00) dan (Rp1.509.010.046,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Perincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	1.696.504.400,00	(1.277.624.881)	418.879.519,00
Aset Lain-Lain	1.101.709.947,00	(1.096.010.947)	5.699.000,00
Jumlah	2.798.214.347,00	(2.373.635.828)	424.578.519,00

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

*Kewajiban Jangka Pendek
Rp2.530.228.036,00*

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka Pendek Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.530.228.036,00 dan Rp8.586.875.000,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan sisa kewajiban pendapatan fungsional Pengawasan Obat dan Makanan

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp1.945.811.910,00*

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.945.811.910,00 dan Rp0,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp1.945.811.910,00 merupakan SPP atau SPM LS bulan Juni yang belum terbit SP2D sampai dengan periode pelaporan. Perincian Belanja Barang yang Masih harus Dibayar adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja barang yang masih harus dibayar	1.945.811.910,00
Jumlah		1.945.811.910,00

*Utang yang Belum Ditagihkan
Rp84.416.126,00*

C.4.2 Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp84.416.126,00 dan Rp0,00 Utang yang belum Ditagihkan merupakan belanja barang yang masih harus dibayar. Utang yang Belum Diterima Tagihannya merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga atau transaksi UP yang belum di GUP.

*Pendapatan Diterima Dimuka
Rp0,00*

C.4.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp8.586.875.000,00 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.

*Uang Muka dari KPPN
Rp500.000.000,00*

C.4.4 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Ekuitas
(Rp 3.131.262.362,00)*

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp 3.131.262.362,00) dan (Rp3.316.526.146,00). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp71.737.425.000,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp71.737.425.000,00 dan Rp66.373.012.500,00

Tabel 36.
Perincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Nama Unit	Realisasi	Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi	Jasa Sertifikasi
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan	52.688.850.000	52.688.850.000	0
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	634.800.000	0	634.800.000
Direktorat Pengawasan Kosmetik	9.826.900.000	0	9.826.900.000
Total	63.150.550.000		

Terdapat perubahan tata cara penerimaan PNBPFungsional yang sebelumnya secara terpusat pada satker Sekretariat Utama. Pada tahun 2024 penerimaan PNBPFungsional dilakukan pada Satker pemberi layanan.

Beban Persediaan
Rp109.619.000,00

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp109.619.000,00 dan Rp118.779.800,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37.
Perincian Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	109.619.000,00	118.779.800,00	-7,71
Jumlah	109.619.000,00	118.779.800,00	-7,71

D.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan

Jasa

Rp9.032.117.636,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.032.117.636,00 dan Rp9.674.810.752,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan mengalami penurunan karena sudah tidak terdapat belanja penanganan pandemi covid 19. Perincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Perincian Beban Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	440.914.729,00	781.578.017,00	(43,59)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		53.945.140,00	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	218.500,00	14.153.656,00	(98,46)
Beban Honor Operasional Satker	12.912.000,00	27.950.000,00	(53,80)
Beban Barang Operasional Lainnya	51.005.000,00	1.500.000,00	3300,33
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	50.580.000,00	(100,00)
Beban Bahan	3.130.760.312,00	4.114.810.450,00	(23,91)
Beban Honor Output Kegiatan	231.200.000,00	233.360.000,00	(0,93)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	319.429.618,00	139.592.784,00	128,83
Beban Sewa	363.009.690,00	580.321.180,00	(22,83)
Beban Jasa Profesi	909.895.000,00	1.179.115.000,00	43,03
Beban Jasa Lainnya	3.572.772.787,00	2.497.904.525,00	(6,64)
Jumlah	9.032.117.636,00	9.674.810.752,00	(6,64)

*Beban
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin
Rp59.093.400,00*

D.3 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp59.093.400,00 dan Rp25.366.249,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 39. Perincian Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-2024	30-Jun-2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.093.400,00	25.366.249,00	132,96
Jumlah	59.093.400,00	25.366.249,00	132,96

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp14.768.991.395,00*

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.768.991.395,00 dan Rp15.504.065.791,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengawasan. Secara keseluruhan mengalami penurunan karena *Automatic Adjustmen* sehingga terdapat perjalanan dinas yang belum dilakukan. Perincian Beban Perjalanan Dinas periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40.
Perincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	4.122.990.273,00	4.333.454.824,00	(4,86)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	129.970.000,00	81.510.000,00	59,45
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.463.258.555,00	1.684.118.928,00	105,64
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.833.146.717,00	9.475.129.969,00	(27,88)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	219.625.850,00	0,00	-
Total Beban Perjalanan Dinas	14.768.991.395,00	15.574.213.721,00	(5,17)
Jumlah	14.768.991.395,00	15.574.213.721,00	(5,17)

Terdapat penurunan beban Perjalanan Dinas yang dibandingkan 30 Juni 2023 sebesar 5 persen.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.379.918.456.00

D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.379.918.456.00 dan Rp1.202.520.894,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41.
Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Jun-24	30-Jun-24	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.186.987.746,00	1.030.716.351,00	15,16
Jumlah Penyusutan	1.186.987.746,00	1.030.716.351,00	15,16
Beban Amortisasi Software	189.250.835,00	171.804.543,00	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.679.875,00	-	-
Jumlah Amortisasi	192.930.710,00	171.804.543,00	12,30
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.379.918.456,00	1.202.520.894,00	14,75

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp0,00)

D.6 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42.
Perincian Kegiatan Non Operasional
Untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(0)	(182.408.810,00)	(100,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	(45.678.910,00)	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	(228.087.720,00)	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(5.270.000,00)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(5.270.000,00)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(0)	(177.138.810,00)	(100,00)

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
(Rp3.316.526.146,00)

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp3.316.526.146,00) dan (Rp3.508.378.978,00)

Defisit LO
Rp46.387.685.113,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp46.387.685.113,00 dan Rp39.670.330.204,00 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0.00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp0,00

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp5.353.636,00).

Koreksi Lain-Lain
Rp0.00

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

Transaksi Antar

Entitas

(Rp39.939.896.605,00)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp39.939.896.605,00) dan (Rp31.894.969.001,00) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 43 Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	23.210.653.395
Diterima dari Entitas Lain	(63.150.550.000)
Jumlah	(39.939.896.605)

Perincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 30 Juni 2024 DKEL sebesar Rp23.210.653.395,00. Rincian atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 44 Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024
	Realisasi
Belanja Barang	21.948.259.395
Belanja Modal	1.262.394.000
Jumlah	23.210.653.395

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024 DDEL sebesar Rp63.150.550.000,00. Perincian atas nilai transaksi diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 45 Perincian Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain
(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	120.626.800.000	63.150.550.000	52
Jumlah	120.626.800.000	63.150.550.000	52

*Kenaikan/
Penurunan
Entitas
Rp6.447.788.508,00*

E.5 Kenaikan/Penurunan Entitas

Nilai Kenaikan Entitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.447.788.508,00 dan Rp7.770.007.567,00

*Ekuitas Akhir
Rp3.131.262.362,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.131.262.362,00 dan Rp4.261.628.589,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 Pengungkapan Lain - Lain

F.2.1 Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

Terdapat temuan BPK pada Tahun Anggaran 2023 antara lain yaitu Sistem Informasi Pengelolaan PNBP dan Pelayanan Publik pada Badan POM Belum Dapat Menyajikan Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Secara Akurat, sudah ditindak lanjuti dengan membuat komentar instansi dan akan berkoordinasi dengan Pusdatin BPOM terkait pengembangan Aplikasi agar aplikasi pelayan publik dan aplikasi e-payment dapat terintegrasi secara realtime, tepat dan akurat serta melakukan perbaikan data sisa kewajiban dengan melakukan jurnal koreksi sisa kewajiban terhadap data yang lebih dan kurang saji.

F.2.2 Rekening Virtual Pengeluaran

Laporan Keuangan Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai 1 rekening yaitu rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Mandiri Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 8100124451611002 dan berubah menjadi Rekening Virtual Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 8100124451611000.

Perincian Rekening pada Bendahara Pengeluaran Pembantu:

No	BPP	No Rekening
1	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611001
2	BPP Dit. Pengawasan Standardisasi OT, SK dan Kos	8100124451611002
3	BPP Dit. Registrasi OT, SK dan Kos	8100124451611003
4	BPP Dit. PMPU OT, SK, dan Kos	8100124451611004
5	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611005

F.2.3 Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor : HK.02.02.41.04.24.538 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik nomor : HK.02.02.41.41.01.24.03 Tentang penetapan pengelola keuangan pada satuan kerja Satuan kerja deputi bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2024. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri dari PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran. Pada satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Pejabat Pembuat Komitmen I	: Meyla Nurwitasari, ST
Pejabat Pembuat Komitmen II	: Kristyawan Hadiyanto D., S.E
Pejabat Pembuat Komitmen III	: Faried Rahendra, SP
Pejabat Pembuat Komitmen IV	: Wijiasih, S.Si., Apt., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen V	: Pulan Widyanati, S.Si., Apt. M.Si.
Pejabat Penandatanganan SPM	: Aprizal, S.Kom
Bendahara Pengeluaran	: Yenny Komalasari, SE

F.2.4 Pengungkapan Terkait Capaian Output Strategis

Selama periode TA 2024, output strategis yang telah dicapai oleh satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut :

Kode Output Strategis		Uraian RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	%	Tar get	Satu an	Reali sasi Vol. Kelu aran
6385	QDC 001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	6.904.108.000	2.346.472.128	33,99	169	Ora ng	33,55
4119	BIA0 01	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	6.781.275.000	2.639.448.789	38,92	3000	Kep utusan	43
6385	BDC 001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	4.047.434.000	1.437.192.791	35,51	294	Ora ng	39,07
4129	CAB 001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	187.000.000	183.796.000	98,29	24	Unit	98
4128	PCA 001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Standar	10.897.024.000	4.154.675.543	38,13	73154	Kep utusan	47,62
4129	ABG 001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam Indonesia yang diselesaikan	691.537.000	235.783.808	34,1	150	Rek ome nda siKe bija kan	50
3165	BDC 001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	4.336.030.000	4.096.842.483	94,48	13250	Ora ng	93,7
4129	AFA 001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	4.231.618.000	2.100.197.259	49,63	10	Stan dar	55
4129	CAN 001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.500.000.000	1.078.598.000	71,91	90	Unit	72
4121	BIA0 01	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	4.679.104.000	2.132.854.051	45,58	1675	Kep utusan	42,03
4119	BAH 001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	4.413.969.000	1.337.547.367	30,3	8900	dok ume n	40
4121	BAH 001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	4.931.984.000	1.594.987.048	32,34	15971	dok ume n	49,29

F.2.5 Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 30 Juni 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. pada Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional VII

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Perincian Pagu Anggaran. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada pada Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

- A. **PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.** Pelaksanaannya diantaranya melalui **1 (satu)** program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai **Rp10.897.024.000.00** dan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2024 sebesar **Rp4.154.675.543,00** dengan perincian sebagai berikut:

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
4128 Direktorat Registrasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	10.897.024.000	4.154.675.543	38.13	Keputusan	73.154	62.252	47.62

F.2.6 Pengungkapan Terkait Tematik APBN

Berkaitan dengan penandaan tematik APBN diatur bahwa satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema. Tema-tema APBN terdiri atas 8 tema, 2 diantaranya terdapat di Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan output strategis	Capaian Output Strategis	%	Keterkaitan dengan PN
63 BD 85 C0 01	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	4.047.434.000	1.437.192.791	35,51	294	Orang	109	39,07	Anggaran Responsif Gender

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Semester I TA 2021

63 85	QD C0 01	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	6.904.108.000	2.346.472.128	33,99	169	Orang	40	33,55	Anggaran Responsif Gender
31 65	BD C0 01	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	4.336.030.000	4.096.842.483	94,48	13250	Orang	1500	93,7	Upaya Konvergensi Penanganan Stunting dan Anggaran Responsif Gender

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL
UAKPA DAN UAKPB SATKER DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK DENGAN UAPA
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN BADAN POM TA 2024
Nomor :4/BAR/SEMESTERI/2024**

Pada hari ini, **Jumat tanggal 19 Juli 2024**, para pihak yang bertandatangan di bawah ini telah menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024**, sebagaimana Lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, sebagai bentuk atas **Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I Tahun Anggaran 2024**.

Berita Acara ini dibuat sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan UAPA. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik akan melakukan perbaikan sesuai hasil rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 ke Bagian Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan **paling lambat tanggal 22 Juli 2024**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Tim Verifikasi

Penyusun CRBMN Satker xxxxx

Penyusun LK Satker xxxxx



Titin Ernawati Fakhruddin, SE
NIP. 19810529 200604 2 001



Erwin Yahya, S.E
NIP. 19870420 201903 1 001



Yoga Setiady, A.Md
NIP.19870127 201502 1 003

MENGETAHUI

Ketua Tim Penyusun Laporan Keuangan BPOM



Rafika Agusriana, S.Si., Apt
NIP. 198008252005012001

NERACA
PER 31 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Lampiran I

Nama Satwil : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Kode Satwil : 445161

AKUN	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (penurunan)	
			Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	500.000.000	0	500.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara kas	0	0	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0	0	0
Penyisihan Piutang bukan pajak	0	0	0	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0	0	0	0
Persediaan	36.782.000	28.116.000	8.666.000	30,82
Persediaan Belum di register		0	0	0
JUMLAH ASET LANCAR	536.782.000	28.116.000	508.666.000	1.809,17
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan TP/TGR	0	0	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0	0
ASET TETAP				
Tanah	0	0	0	0
Tanah Belum di register	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	16.178.376.778	16.017.692.725	160.684.053	1,00
Peralatan dan Mesin Belum di register	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan Belum di register	0	0	0	0
Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Jalan Irigasi dan Jaringan Belum di register	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	302.765.200	302.765.200	0	0,00
Aset Tetap Lainnya Belum di register	0	0	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	(11.781.012.099)	(11.686.355.425)	(94.656.674)	0,81
JUMLAH ASET TETAP	4.700.129.879	4.634.102.500	66.027.379	1,42
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1.696.504.400	2.117.140.400	(420.636.000)	(20)
Aset Lain - Lain	1.101.709.947	0	1.101.709.947	0
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Akum. Penyusutan Aset Lainnya	(2.373.635.828)	(1.509.010.046)	(864.625.782)	57
Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA	424.578.519	608.130.354	(183.551.835)	(30)
JUMLAH ASET	5.661.490.398	5.270.348.854	391.141.544	7,42
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.945.811.910	0	1.945.811.910	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	84.416.126		84.416.126	0
Hibah Yang Belum Disahkan	0	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0
Uang Muka dari KPPN	500.000.000	0	500.000.000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JGK PENDEK	2.530.228.036	0	2.530.228.036	0
JUMLAH KEWAJIBAN	2.530.228.036	0	2.530.228.036	0

NERACA

PER 31 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Lampiran I

Nama Satwil : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Kode Satwil : 445161

AKUN	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (penurunan)	
			Jumlah	%
EKUITAS	3.131.262.362	4.261.628.589	(1.130.366.227)	(27)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.661.490.398	4.261.628.589	1.399.861.809	32,85

Jakarta, 19 Juli 2024

Penyusun CRBMN Satker Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik

Erwin Yahya, S.E

NIP. 19870420 201903 1 001

Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik

Yoga Setiady, A.Md

NIP. 19870127 201502 1 003

Tim Verifikasi

Titin Ernawati Fakhruddin, SE

NIP. 19810529 200604 2 001

Lampiran II

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 2023

Nama Satwil : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Kode Satwil : 445161

URAIAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Kenaikan (penurunan)	
			Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	71.737.425.000	66.373.012.500	5.364.412.500	8,08
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	71.737.425.000	66.373.012.500	5.364.412.500	8,08
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	-	-	-	0
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	0
PENDAPATAN PENYESUAIAN				
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	71.737.425.000	66.373.012.500	5.364.412.500	8,08
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai			-	0
Beban Persediaan	109.619.000	118.779.800	(9.160.800)	(7,71)
Beban Barang dan Jasa	9.032.117.636	9.674.810.752	(642.693.116)	(6,64)
Beban Pemeliharaan	59.093.400	25.366.249	33.727.151	132,96
Beban Perjalanan Dinas	14.768.991.395	15.504.065.791	(735.074.396)	(4,74)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	0
Beban Bunga	-	-	-	0
Beban Subsidi	-	-	-	0
Beban Hibah	-	-	-	0
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.379.918.456	1.202.520.894	177.397.562	14,75
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	0
Beban Transfer	-	-	-	0
Beban Lain-lain	-	-	-	0
Beban Penyesuaian	-	-	-	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	25.349.739.887	26.525.543.486	(1.175.803.599)	(4,43)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	46.387.685.113	39.847.469.014	6.540.216.099	16,41
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	45.678.910	(45.678.910)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	228.087.720	(228.087.720)	(100)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	(182.408.810)	(273.766.630)	150,08
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	5.270.000	(5.270.000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	5.270.000	(5.270.000)	(100)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	-	(177.138.810)	177.138.810	(100)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	-	-	-	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	0
SURPLUS/(DEFISIT) LO	46.387.685.113	39.670.330.204	6.717.354.909	16,93

Jakarta, 19 Juli 2024
Tim Verifikasi



Titin Ernawati Fakhruddin, SE
NIP. 19810529 200604 2 001

Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik



Yoga Setiady, A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 2023

Nama Satwil : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Kode Satwil : 445161

AKUN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
EKUITAS AWAL	(3.316.526.146)	(3.508.378.978)	191.852.832	(5,47)
SURPLUS/DEFISIT LO	46.387.685.113	39.670.330.204	6.717.354.909	16,93
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI				
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI				
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN				
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Asset Tetap/ Aset Lainnya	0	0	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(5.353.636)	5.353.636	(100)
Lain-lain	0	0	0	0
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	0	(5.353.636)	5.353.636	(100,00)
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(39.939.896.605)	(31.894.969.001)	(8.044.927.604)	25,22
Ditagihkan Ke Entitas Lain	23.210.653.395	25.274.629.909	(2.063.976.514)	(8,17)
Diterima dari Entitas Lain	(63.150.550.000)	(57.169.598.910)	(5.980.951.090)	10,46
Transfer Keluar	0	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0	0
Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	0	0	0
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	6.447.788.508	7.770.007.567	(1.322.219.059)	(17,02)
EKUITAS AKHIR	3.131.262.362	4.261.628.589	(1.130.366.227)	(26,52)

Jakarta, 19 Juli 2024

Penyusun CRBMN Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Erwin Yahya, S.E
NIP. 19870420 201903 1 001

Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

Yoga Setiady, A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003

Tim Verifikasi

Titin Ernawati Fakhruddin, SE
NIP. 19810529 200604 2 001

Lampiran IV

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 2023

Nama Satwil : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Kode Satwil : 445161

A. PENDAPATAN

URAIAN	30 Juni 2024			30 Juni 2023		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
41. Penerimaan Perpajakan					0	0
42. Penerimaan Negara Bukan Pajak	63.150.550.000	0	63.150.550.000	57.169.598.910	0	57.169.598.910
421. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0
422. Pendapatan Bagian Laba BUMN	0	0	0	0	0	0
423. PNPB Lainnya	63.150.550.000	0	63.150.550.000	57.169.598.910	0	57.169.598.910
424. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0
43. Penerimaan Hibah	0	0	0	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN	63.150.550.000	0	63.150.550.000	57.169.598.910	0	57.169.598.910

B. BELANJA

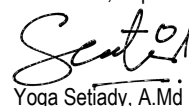
JENIS BELANJA	URAIAN	30 Juni 2024			30 Juni 2023		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
51	Belanja Pegawai	-		-	-		-
52	Belanja Barang	22.076.001.267	127.741.872	21.948.259.395	24.105.111.939	70.147.930	24.034.964.009
53	Belanja Modal	1.262.394.000		1.262.394.000	1.239.665.900		1.239.665.900
54	Pembayaran Bunga Utang	-		-	-		-
55	Subsidi	-		-	-		-
56	Hibah	-		-	-		-
57	Bantuan Sosial	-		-	-		-
58	Belanja Lain-lain	-		-	-		-
	TOTAL	23.338.395.267	127.741.872	23.210.653.395	25.344.777.839	70.147.930	25.274.629.909

Tim Verifikasi



Titin Errawati Fakhruddin, SE
NIP. 19810529 200604 2 001

Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Yoga Setiady, A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003